

**ASPEK HUKUM TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Studi Kasus Pembuangan limbah
B3 Secara Ilegal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat)**

Oleh :

Anindya Dwi Haprita¹, Harry Supriyono²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan secara akademis faktor-faktor penyebab pembuangan limbah B3 secara ilegal di hutan mangrove di Dusun Kepuh, Desa Pusakajaya Utara dan peran instansi yang berwenang dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris meliputi studi kepustakaan melalui analisis berdasarkan pada instrumen hukum yang relevan, buku dan jurnal serta dikombinasikan dengan studi lapangan berupa wawancara dengan berbagai narasumber baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai UPTD terkait dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setelah mendapat materi terkait dari studi kepustakaan dan studi lapangan, akan dianalisis mengenai masalah yang bersangkutan.

Penelitian hukum ini memberikan jawaban bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pembuangan limbah B3 secara ilegal di hutan mangrove di Dusun Kepuh, Desa Pusakajaya Utara adalah ketidaktaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3 dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait mengenai pengelolaan limbah B3. Dalam hal ini, pemerintah kurang maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah B3. Namun, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk adanya prospek pengaturan yang ideal dalam rangka menunjang proses pengelolaan limbah B3 yang sesuai prosedur diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pengangkutan limbah B3 sehingga proses pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan pengawasan oleh pemerintah agar mempermudah dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Aspek Hukum Administrasi, Pengelolaan Limbah B3, Penegakan Hukum dan Pengawasan

¹Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (anindyahaprita@gmail.com).

²Dosen pada Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

THE ASPECT OF GOVERNANCE LAW AND THE CONTROL OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (a case study of illegal disposal of hazardous and toxic waste in Karawang, West Java)

by:

Anindya Dwi Haprita³Harry Supriyono⁴

This research aims to know, analyze, and describe academically the factors that cause illegal B3 waste disposal in mangrove forest in Dusun Kepuh, North Pusakajaya Village, and the role of authority in applying the function of guidance, supervision and law enforcement according to the law.

The method of research is empiric-normative, including library research through analysis based on relevant law instrument, book and journal, and combined with field research in the form of interview with various interviewees from Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Karawang Regency Environmental Office as the relevant UPTD, and Ministry of Health of the Republic of Indonesia. After obtaining relevant material from library and field research, the problem in question will be analyzed.

This research in law shows that the factors that cause the illegal B3 waste disposal in mangrove forest in Dusun Kepuh, North Pusakajaya Village, are the disobedience of businessmen or activity doer on law of B3 waste management and the lack of supervision from relevant authority on B3 waste management. In this case, the authority is not optimal in doing function of supervision based on law of B3 waste management. However, the law enforcement done by the authority is in accordance with relevant law. In order to make the ideal configuration prospect to support the process of B3 waste management that follows the procedure specific configuration on B3 waste management is needed, so that the authority can supervise the B3 waste disposal process.

***Key words: Aspect of Administrative Law, B3 Waste Management, Law
Enforcement and Supervision***

³Undergraduate Student (S-1) of Department of Environment Law, Faculty of Law, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta (anindyahaprita@gmail.com).

⁴Lecturer of Department of Environment Law, Faculty of Law, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta.